

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 18, Oktober 2026 | Revised: 23, Oktober 2026 | Accepted: 26, Oktober 2026

Digital Governance dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem: Integrasi Data dan Kolaborasi Lintas Aktor melalui Kemisan Mesra di Kabupaten Pasuruan

Retna Dea Mustika¹, Bintoro Wardiyanto², Mar'atus Ratna Kurnia³

¹Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,

retna.dea.mustika-2025@pasca.unair.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,

bintoro.wardiyanto@fisip.unair.ac.id

³Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,

maratus.ratna.kurnia-2025@pasca.unair.ac.id

Corresponding Author: retna.dea.mustika-2025@pasca.unair.ac.id¹

Abstract: *The eradication of extreme poverty is a public service challenge requiring data integration, program alignment, and cross-actor coordination. In the context of digital governance, the Pasuruan Regency Government developed KEMISAN MESRA (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera, or Extreme Poverty Eradication toward a Prosperous Society) to link extreme-poverty target data with intervention programs implemented by local government agencies. This study analyzes digital governance implementation through KEMISAN MESRA, focusing on data integration, cross-actor collaboration, and intervention monitoring and accountability. A descriptive qualitative approach was employed through document analysis of regional innovation reports, supporting documents, official government information, and academic literature. The study addresses the limited research on collaborative governance mechanisms that connect data, actors, and actions through digital platforms to eradicate extreme poverty at the local level. The findings show that 98.00% of target individuals were recorded as having received interventions; however, a direct causal effect on extreme-poverty reduction has not been established. The study's novelty lies in conceptualizing the platform as a co-coordination instrument linking data integration, cross-actor collaboration, and intervention monitoring and accountability. Its effectiveness depends on data quality, clearly defined responsibilities, and outcome-based evaluation.*

Keyword: *Digital Governance, Extreme Poverty, KEMISAN MESRA, Collaborative Governance, Co-coordination*

Abstrak: Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tantangan pelayanan publik yang menuntut integrasi data, keterpaduan program, dan koordinasi lintas aktor. Dalam konteks *digital governance*, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengembangkan KEMISAN MESRA

(Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera) sebagai inovasi digital untuk menghubungkan data sasaran kemiskinan ekstrem dengan program intervensi perangkat daerah. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan tata kelola digital melalui KEMISAN MESRA, khususnya dalam integrasi data, kolaborasi lintas aktor, serta pemantauan dan akuntabilitas intervensi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen laporan inovasi daerah, dokumen pendukung, informasi resmi pemerintah, dan literatur akademik. Penelitian berangkat dari terbatasnya kajian mengenai mekanisme *collaborative governance* yang menghubungkan data, aktor, dan tindakan melalui platform digital untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan 98,00% sasaran telah tercatat terintervensi namun belum terbuktinya dampak kausal langsung terhadap penurunan kemiskinan ekstrem. Kebaruan penelitian terletak pada pemosisian platform digital sebagai instrumen *co-coordination* yang secara analitis menghubungkan integrasi data, kolaborasi lintas aktor, serta pemantauan dan akuntabilitas intervensi. Efektivitas penerapannya bergantung pada kualitas data, kejelasan tanggung jawab, dan evaluasi berbasis hasil.

Kata Kunci: *Digital Governance*, Kemiskinan Ekstrem, KEMISAN MESRA, *Collaborative Governance*, *Co-coordination*.

PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem masih menjadi salah satu persoalan pembangunan yang menuntut kapasitas pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan, data, dan pelayanan secara presisi. Badan Pusat Statistik (2024) menyatakan bahwa, meski indikator kemiskinan di Indonesia membaik, namun 25,22 juta penduduk atau 9,03% populasi nasional masih berada pada kategori miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu memastikan intervensi menjangkau kelompok rentan sesuai karakteristik kebutuhannya. Perkembangan *digital government* membuka peluang untuk memperkuat kapasitas pemerintah melalui pemanfaatan teknologi, integrasi informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun transformasi digital tetap dihadapkan dengan resiko fragmentasi organisasi, mutu data, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan (Eom & Lee, 2022). Dengan demikian, penghapusan kemiskinan ekstrem tidak cukup ditempuh dengan digitalisasi administrasi, namun membutuhkan tata kelola dalam integrasi data dengan proses koordinasi dan tindakan publik.

Dalam konteks tersebut, *digital governance* perlu dipahami sebagai transformasi mekanisme tata kelola melalui pemanfaatan teknologi untuk memperkuat integrasi informasi, transparansi, dan hubungan antara pemerintah dengan aktor nonpemerintah. Digitalisasi akan bernilai strategis apabila mampu mendukung pengambilan keputusan dan penyelarasan tindakan antarorganisasi. Perspektif ini berkaitan dengan *New Public Governance* (NPG), yang menekankan pentingnya jejaring antarorganisasi, kemitraan, dan interaksi berbagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Krogh dan Triantafillou (2024) menjelaskan bahwa NPG memberikan perhatian pada tata kelola hubungan antarorganisasi dan jejaring kebijakan, bukan semata-mata pada pengelolaan internal birokrasi. Dengan demikian, NPG relevan untuk menjelaskan bahwa penanganan persoalan publik yang kompleks membutuhkan kolaborasi antarpemangku kepentingan, sedangkan *digital governance* dapat mendukung proses tersebut melalui integrasi data dan komunikasi lintas organisasi.

Relevansi NPG semakin kuat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem karena persoalan ini bersifat multidimensional dan berkaitan dengan perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi. Tidak ada satu organisasi yang memiliki seluruh sumber daya untuk menangani persoalan tersebut secara

mandiri. Kajian *collaborative governance* menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun kontribusi yang saling melengkapi (Osborne, 2010). Studi penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung juga menunjukkan bahwa koordinasi, pembagian peran, kepemimpinan fasilitatif, dan desain kelembagaan memengaruhi kualitas kolaborasi antaraktor (Permani et al., 2021). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengoordinasikan sumber daya dan mengarahkan berbagai intervensi menjadi pelayanan yang terpadu.

Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, kebutuhan tersebut melatarbelakangi lahirnya KEMISAN MESRA atau Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pasuruan meluncurkan aplikasi tersebut pada September 2023 untuk mengintegrasikan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) berbasis *by name by address* (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2023a). Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 turut menempatkan pendataan, koordinasi lintas aktor, pengaduan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi menjadi bagian dalam penghapusan kemiskinan ekstrem (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2023b). KEMISAN MESRA memuat informasi individu miskin ekstrem, wilayah sasaran, serta status intervensi. Kondisi tersebut menjadikan KEMISAN MESRA relevan untuk mengkaji bagaimana platform digital menghubungkan informasi kemiskinan dengan koordinasi program dan pelayanan lintas perangkat daerah.

Integrasi data melalui KEMISAN MESRA memiliki konsekuensi terhadap manajemen layanan, sebab kualitas informasi memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menetapkan sasaran, menentukan intervensi dan memantau hasilnya. Aplikasi ini memberikan akses data kemiskinan ekstrem kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain, untuk mengarahkan kontribusi berdasarkan identitas dan lokasi penerima (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, n.d.). Intervensi yang dihubungkan didalamnya meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan mekanisme monitoring (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2023c). Pola tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan programatik yang terfragmentasi menuju tata kelola yang menautkan data sasaran dengan beragam sumber daya pelayanan. Karena itu, nilai strategis KEMISAN MESRA tidak berhenti pada sisi teknologinya, tetapi menciptakan ruang koordinasi lintas aktor yang berkepentingan.

Dalam literatur digital government, kolaborasi data ditempatkan sebagai fondasi tata kelola digital, namun integrasi teknologi tetap ditentukan oleh hubungan antarlembaga dan kapasitas kelembagaan. Menurut Schmeling et al. (2025), kolaborasi data dalam *digital government* menggarisbawahi perlunya memperhatikan relasi antara ekosistem, organisasi, dan individu dalam proses berbagi serta pemanfaatan data. Kajian lain mengenai ekosistem *open government* turut menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai penyedia sekaligus penghubung data dengan melibatkan komunitas pengguna, organisasi masyarakat, dan aktor lainnya (Reggi & Dawes, 2022). Di Indonesia, Wahyuni et al. (2024) menunjukkan keterkaitan antara teknologi, transparansi, kolaborasi, dan integrasi dalam digital government, sehingga sistem digital membutuhkan kapasitas kelembagaan yang adaptif. Sehingga keberhasilan platform digital semestinya dinilai bukan hanya dari aspek teknologi, melainkan dari interaksi, pertukaran informasi, koordinasi, dan penyelarasan tindakan antaraktor.

Meski kajian *digital governance*, *data collaboration*, dan *collaborative governance* terus berkembang, akan tetapi penelitian mengenai mekanisme *co-coordination* dalam implementasi platform digital untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah masih terbatas. Studi terdahulu cenderung membahas kolaborasi sebagai struktur hubungan antaraktor atau mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan secara kelembagaan (Scupola & Mergel, 2022; Muslim et al., 2021). Adapun studi *digital government* lebih banyak

menyoroti transformasi teknologi, integrasi sistem, ekosistem data, dan inovasi pelayanan (Permani et al., 2021; Schmeling et al., 2025; Reggi & Dawes, 2022). Literatur tersebut belum menjelaskan secara memadai bagaimana platform digital mempertemukan data, aktor, tanggung jawab, dan tindakan secara simultan dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Kesenjangan ini penting karena *co-coordination* memandang koordinasi sebagai proses menyelaraskan tindakan antarpihak berdasarkan informasi dan tujuan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelusuri proses, hubungan, dan pola koordinasi dalam penyelenggaraan KEMISAN MESRA.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *digital governance* dalam penghapusan kemiskinan ekstrem melalui KEMISAN MESRA di Kabupaten Pasuruan, dengan fokus pada integrasi data dan mekanisme *co-coordination* dalam tata kelola kolaboratif lintas aktor. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana data kemiskinan diintegrasikan, bagaimana platform digital mendukung koordinasi antarpemangku kepentingan, serta bagaimana integrasi tersebut membentuk penyelarasan intervensi pelayanan publik. Secara teoretis, penelitian ini mempertemukan perspektif *digital governance*, *data collaboration*, dan *collaborative governance* untuk menjelaskan koordinasi dalam persoalan publik yang kompleks. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat interoperabilitas data, pembagian peran, koordinasi, dan monitoring intervensi berbasis data. Dengan demikian, KEMISAN MESRA diposisikan bukan sekadar sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai arena tata kelola yang mempertemukan data, organisasi, dan aktor untuk meningkatkan ketepatan pelayanan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis dokumen (*document analysis*). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menghasilkan uraian sistematis mengenai karakteristik dan desain tata kelola KEMISAN MESRA berdasarkan informasi yang tersedia dalam dokumen, tanpa melakukan pengujian hubungan sebab-akibat (Sandelowski, 2000). Analisis dokumen digunakan sebagai metode pengumpulan dan pemeriksaan data tertulis yang relevan untuk mengidentifikasi informasi, pola, dan makna yang berkaitan dengan fenomena penelitian (Bowen, 2009; Morgan, 2022). Pengumpulan dan penelusuran dokumen penelitian dilaksanakan pada bulan agustus – september tahun 2026. Analisis menggunakan tiga dimensi utama, yaitu integrasi data dan program, koordinasi kolaboratif lintas aktor (*co-coordination*), serta pemantauan dan akuntabilitas intervensi. Selain itu, analisis dokumen mencakup aspek potensi replikasi atau transferabilitas inovasi untuk mengidentifikasi kondisi pendukung, persyaratan kelembagaan, dan tantangan penerapan KEMISAN MESRA pada pemerintah daerah lain. Keempat aspek tersebut menjadi dasar untuk menganalisis desain tata kelola KEMISAN MESRA dalam mendukung penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi serta menilai kemungkinan penerapannya dalam konteks daerah yang berbeda.

Sumber data utama penelitian ini adalah Laporan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengenai KEMISAN MESRA yang memuat identitas inovasi, latar belakang pengembangan, rancangan sistem, alur intervensi, tujuan, manfaat, hasil, serta indikator kelembagaan dan pelaksanaannya. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa KEMISAN MESRA mengintegrasikan program intervensi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) berbasis *by name by address*. Sistem ini menyediakan mekanisme penentuan strategi, pemilihan program dan kegiatan, pencatatan anggaran, penetapan lokasi dan sasaran, serta pemantauan intervensi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Peneliti menggunakan informasi tersebut sebagai bukti utama untuk mengidentifikasi desain operasional dan hubungan koordinasi yang terdokumentasi. Literatur akademik mengenai tata

kelola digital dan kolaborasi antarlembaga berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menafsirkan temuan, bukan sebagai pengganti bukti empiris mengenai pelaksanaan KEMISAN MESRA.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan menyeleksi informasi mengenai permasalahan sebelum pengembangan inovasi, tujuan sistem, struktur pelaksana, sumber data, alur intervensi, peran aktor, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Kedua, peneliti mengodekan informasi berdasarkan tiga dimensi analisis. Dimensi integrasi data mencakup penggunaan P3KE, keterhubungan data sasaran dengan program, dan pencatatan intervensi. Dimensi *co-coordination* mencakup pembagian peran, penyelarasan program, penentuan sasaran bersama, serta keterlibatan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Dimensi pemantauan dan akuntabilitas mencakup keterlacakan intervensi, pencatatan dukungan anggaran, pembaruan informasi, dan evaluasi capaian program. Sementara itu, dimensi transferabilitas mencakup identifikasi kondisi pendukung, kebutuhan sumber daya dan kapasitas kelembagaan, kesesuaian mekanisme koordinasi, serta potensi kendala penerapan inovasi pada konteks pemerintahan daerah yang berbeda. Ketiga, peneliti membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pengembangan sistem sebagaimana tergambar dalam dokumen untuk mengidentifikasi perubahan desain koordinasi dan pengelolaan informasi. Keempat, peneliti menginterpretasikan kesesuaian dan kesenjangan antara mekanisme yang terdokumentasi dengan prinsip tata kelola digital dan kolaboratif, kemudian merumuskan implikasinya bagi penguatan pelayanan publik dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

Penelitian ini menerapkan pemeriksaan silang antara informasi faktual dalam laporan inovasi dan kerangka konseptual dari literatur ilmiah untuk memperkuat ketepatan interpretasi. Peneliti membedakan tiga kategori bukti, yaitu tujuan dan rancangan sistem, pelaksanaan atau capaian yang dilaporkan, serta dampak substantif terhadap kondisi kemiskinan ekstrem. Pembedaan tersebut penting karena keberadaan platform digital, integrasi data, dan mekanisme pemantauan tidak dengan sendirinya membuktikan keberhasilan koordinasi antarlembaga ataupun penurunan kemiskinan ekstrem. Peneliti juga mempertimbangkan kemungkinan kesenjangan antara fungsi sistem yang direncanakan dan praktik penggunaannya. Dalam menilai transferabilitas, peneliti membedakan karakteristik inovasi yang berpotensi diterapkan pada daerah lain dari aspek yang bergantung pada kondisi lokal, seperti kapasitas kelembagaan, kualitas data, dukungan sumber daya, dan mekanisme koordinasi. Penilaian ini merupakan analisis atas potensi penerapan berdasarkan bukti dokumenter, bukan klaim bahwa inovasi telah berhasil direplikasi di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian tidak mengatribusikan perubahan tingkat kemiskinan ekstrem secara langsung kepada KEMISAN MESRA tanpa dukungan data hasil intervensi dan indikator kemiskinan yang memadai. Pemeriksaan ini menjaga agar kesimpulan tetap sejalan dengan cakupan dan kekuatan bukti dokumenter.

Unit analisis penelitian ini adalah model tata kelola digital KEMISAN MESRA sebagai inovasi pengelolaan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan, bukan individu penerima manfaat atau satu perangkat daerah secara terpisah. Pemilihan unit analisis tersebut memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara sistem informasi, mekanisme koordinasi, keterlibatan aktor, dan proses pengambilan keputusan dalam satu kerangka tata kelola. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan analisis interpretatif mengenai kontribusi potensial KEMISAN MESRA dalam memperkuat integrasi data dan koordinasi lintas aktor, sekaligus mengidentifikasi kondisi pendukung, keterbatasan bukti dan pertimbangan kontekstual yang perlu diperhatikan dalam menilai efektivitasnya terhadap hasil penghapusan kemiskinan ekstrem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Digital Governance dalam Inovasi KEMISAN MESRA Pemerintah Kabupaten Pasuruan

KEMISAN MESRA (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera) merupakan inovasi digital Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dirancang untuk mengintegrasikan data sasaran penduduk miskin ekstrem dengan program intervensi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Inovasi ini mencerminkan penerapan *digital governance*, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pemerintahan, mengintegrasikan informasi, memperkuat koordinasi antarorganisasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, teknologi berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan kebijakan.

Inovasi ini dikembangkan untuk membantu perangkat daerah mengakses data kemiskinan ekstrem berdasarkan *by name by address*, menentukan sasaran program secara lebih spesifik, serta memantau intervensi yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasuruan meluncurkan aplikasi ini pada 19 September 2023 melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), dengan dukungan tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2023a).

Berdasarkan perspektif *digital governance*, KEMISAN MESRA menunjukkan upaya memanfaatkan teknologi untuk mengatasi fragmentasi informasi dan memperkuat dasar pengambilan keputusan. Namun, integrasi data tidak selalu identik dengan integrasi tata kelola. Ketersediaan data dalam satu platform belum menjamin bahwa perangkat daerah menyusun prioritas secara bersama, menyelaraskan anggaran, atau mengoordinasikan pelaksanaan intervensi. Manfaat KEMISAN MESRA karena itu perlu dinilai berdasarkan kemampuannya mengubah informasi menjadi keputusan dan tindakan lintas organisasi, bukan sekadar berdasarkan keberadaan aplikasi. Dalam perspektif *New Public Governance* (NPG), teknologi dapat mendukung jejaring kolaborasi, tetapi efektivitas jejaring tetap ditentukan oleh komitmen aktor, pembagian tanggung jawab, dan kesediaan organisasi untuk bekerja menuju tujuan bersama.

Temuan mengenai integrasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam KEMISAN MESRA dapat dianalisis lebih lanjut melalui konsep *data collaboration* yang menempatkan kolaborasi data sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek ekosistem, organisasi, dan individu, sehingga pemanfaatan data tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur teknologi, tetapi juga dengan hubungan antarpelaku dan tata kelola pengelolaannya. Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, penggunaan data P3KE berbasis *by name by address* yang dihubungkan dengan program, lokasi, kelompok sasaran, dan dukungan anggaran menunjukkan upaya mengintegrasikan informasi dengan proses perencanaan intervensi. Temuan ini juga sejalan dengan Reggi dan Dawes (2022), yang menempatkan hubungan antarpemerintah dan komunitas pengguna sebagai bagian penting dalam pembentukan ekosistem data pemerintahan. Keterhubungan tersebut berpotensi membantu perangkat daerah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan intervensi berdasarkan sasaran yang sama.

Meskipun KEMISAN MESRA telah memfasilitasi keterhubungan data sasaran dengan program intervensi perangkat daerah, integrasi tersebut tetap menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas dan konsistensi data yang digunakan. Tantangan ini perlu ditempatkan dalam konteks implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Nurmandi et al. (2022) mengkaji upaya integrasi data pemerintah melalui kebijakan tersebut dan menunjukkan pentingnya memahami persoalan integrasi dalam praktik pemerintahan daerah. Dalam konteks penelitian ini, keterhubungan data P3KE dengan program intervensi merupakan

langkah penting, tetapi perlu disertai standardisasi, pemutakhiran, dan konsistensi penggunaan data antarlembaga agar informasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, jika dikaitkan dengan kerangka Schmeling et al. (2025), integrasi teknis tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa kolaborasi data telah berjalan optimal. Kualitas dan standardisasi data, konsistensi pembaruan informasi, kejelasan akses dan tanggung jawab pengelolaan, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan tetap menjadi aspek penting. Dengan demikian, temuan KEMISAN MESRA memperlihatkan bahwa nilai tata kelola digital terletak bukan hanya pada penggabungan data, melainkan juga pada kemampuan organisasi mengelola dan memanfaatkan data secara kolaboratif untuk mendukung intervensi kemiskinan ekstrem.

B. Collaborative Governance melalui Co-Coordination dalam Implementasi KEMISAN MESRA

Secara kelembagaan, Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan menjadi penggagas dan pengembang inovasi ini. Dalam dokumen rancangan aksi perubahan tahun 2023, pengembangan KEMISAN MESRA dilatarbelakangi oleh belum terintegrasinya data sasaran dengan program perangkat daerah. Kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memantau kesesuaian intervensi, menghindari keterpisahan pelaksanaan program, dan mengukur capaian penanganan kemiskinan secara terpadu (Prayogo, 2023).

Pembagian peran dalam KEMISAN MESRA dapat dipahami melalui perspektif *New Public Governance* (NPG) yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Krogh dan Triantafillou (2024) mengembangkan perspektif NPG dengan menyoroti mekanisme untuk memperkuat kolaborasi di dalam sektor publik, termasuk hubungan antarlembaga pemerintah. Dalam konteks KEMISAN MESRA, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan KEMISAN MESRA terdiri atas beberapa kelompok yang memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda (Prayogo, 2023). Bappelitbangda berperan dalam mengembangkan inovasi dan mengoordinasikan perencanaan, Diskominfo memberikan dukungan teknis, organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan program intervensi sesuai kewenangannya, sedangkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan pemantauan dan evaluasi, termasuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang telah maupun belum memperoleh intervensi. Selain unsur pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan dunia usaha juga dapat berkontribusi melalui pelaksanaan program yang relevan maupun tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR). Adapun penduduk miskin ekstrem yang tercantum dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) merupakan kelompok sasaran intervensi. Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan laporan mengenai permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut oleh OPD terkait.

Pembagian peran tersebut dapat dianalisis lebih lanjut melalui perspektif *New Public Governance* dan kapasitas tata kelola. Voets et al. (2021) menempatkan *collaborative governance* sebagai pendekatan yang melibatkan hubungan dan kerja sama antara aktor pemerintah maupun nonpemerintah dalam menangani persoalan publik. Sementara itu, Van Popering-Verkerk et al. (2022) menawarkan kerangka kapasitas tata kelola yang menekankan perlunya memahami kapasitas untuk mengarahkan dan mengoordinasikan upaya kolektif dalam masyarakat. Dalam konteks KEMISAN MESRA, pembagian fungsi antara Bappelitbangda, Diskominfo, OPD, dan TKPKD menyediakan landasan kelembagaan bagi koordinasi lintas organisasi. Keterhubungan data sasaran dengan program intervensi juga berpotensi membantu aktor mengidentifikasi kebutuhan dan

Mekanisme kerja KEMISAN MESRA dimulai dengan penggunaan data P3KE sebagai dasar penentuan sasaran, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan strategi intervensi, program, kegiatan, lokasi, dan dukungan anggaran. Pelaksana mencatat intervensi berdasarkan sasaran yang dituju, sedangkan TKPKD memanfaatkan informasi dalam sistem untuk memantau perkembangan penanganan kemiskinan ekstrem. Laporan inovasi daerah menjelaskan bahwa strategi intervensi meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2023c). Mekanisme tersebut memperlihatkan hubungan antara digital governance dan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision-making*). Data yang terhubung dengan informasi program memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan sasaran, menelusuri intervensi yang telah diberikan, dan menemukan kelompok yang belum memperoleh penanganan. Di sisi lain, keterhubungan informasi membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Namun, efektivitas mekanisme tersebut tidak dapat dinilai hanya dari tersedianya aplikasi atau tercatatnya intervensi. Kualitas data, konsistensi pembaruan informasi, ketepatan sasaran, tindak lanjut pelaksanaan program, dan komitmen setiap aktor tetap menentukan keberhasilan tata kelola digital. Oleh karena itu, KEMISAN MESRA perlu dipahami sebagai instrumen pendukung tata kelola pemerintahan, bukan sebagai jaminan bahwa kemiskinan ekstrem akan berkurang secara otomatis.

Keberhasilan KEMISAN MESRA perlu dinilai dengan membedakan capaian operasional aplikasi dari dampak substantif terhadap kemiskinan ekstrem. Salah satu indikator operasional yang dapat diamati ialah jumlah penduduk sasaran yang telah menerima intervensi. Berikut ini adalah gambaran dari distribusi penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan.



Gambar 1. Distribusi Penduduk Miskin Ekstrem dan Cakupan di Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan tampilan *platform* resmi KEMISAN MESRA, sistem menampilkan 27.398 individu miskin ekstrem di 334 desa, dengan 26.849 individu tercatat telah diintervensi dan 549 individu belum diintervensi (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, n.d.). Berdasarkan angka tersebut, persentase sasaran yang tercatat telah diintervensi mencapai sekitar 98,00%, sedangkan sasaran yang belum diintervensi sekitar 2,00%. Meskipun cakupan intervensi yang tercatat telah mencapai sekitar 98,00%, angka tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh kebutuhan kelompok sasaran telah terpenuhi atau bahwa mereka telah keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, capaian tersebut perlu ditelaah lebih lanjut dari perspektif akuntabilitas dan evaluasi hasil pelaksanaan program.

Aspek akuntabilitas tersebut sejalan dengan kajian Pribadi et al. (2024), yang menelaah keterkaitan organisasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasi layanan pemerintahan digital di Indonesia. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa keberadaan sistem digital perlu didukung oleh kapasitas organisasi, kepemimpinan, regulasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Penguatan KEMISAN MESRA perlu diarahkan tidak hanya pada pencatatan status intervensi, tetapi juga pada tindak lanjut program dan evaluasi hasil yang dapat diverifikasi.

Namun, apabila dilihat dari perspektif kapasitas tata kelola yang dibahas oleh Van Popering-Verkerk et al. (2022), pencatatan dan pengendalian program perlu dipahami sebagai bagian dari kapasitas koordinasi yang lebih luas, bukan sebagai bukti tunggal keberhasilan kebijakan. Demikian pula, perspektif *collaborative governance* dari Voets et al. (2021) menekankan pentingnya hubungan kerja sama dalam mencapai tujuan publik. Oleh sebab itu, capaian administratif KEMISAN MESRA perlu dibedakan dari hasil substantif berupa perubahan kondisi kesejahteraan penerima manfaat. Penilaian yang lebih menyeluruh membutuhkan informasi mengenai jenis intervensi, kesesuaian program dengan kebutuhan sasaran, tindak lanjut yang dilakukan, dan perubahan kondisi penerima setelah intervensi. Dengan keterbatasan bukti dokumenter yang tersedia, angka 98,00% lebih tepat dipahami sebagai cakupan sasaran yang tercatat telah diintervensi, bukan sebagai bukti bahwa kemiskinan ekstrem telah berhasil dihapuskan atau bahwa perubahan kemiskinan disebabkan secara langsung oleh penggunaan aplikasi.

Data pemerintah daerah mengenai perubahan jumlah penduduk miskin ekstrem pada 2023 memberikan gambaran tambahan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem turun dari 28.673 orang pada Triwulan I 2023 menjadi 27.398 orang pada Triwulan IV 2023, atau berkurang sebanyak 1.275 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pada Triwulan I, penurunan tersebut setara dengan sekitar 4,45%. Pemerintah daerah juga menyebutkan bahwa pelaksanaan program lintas OPD dipantau secara berkelanjutan melalui KEMISAN MESRA. Program yang dilaksanakan meliputi bantuan kesehatan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dukungan sarana dan prasarana permodalan, perbaikan rumah tidak layak huni, jambanisasi, serta bantuan Pendidikan (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2023c).

Perubahan tersebut merupakan indikasi positif dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa KEMISAN MESRA secara langsung menyebabkan penurunan sebesar 4,45%. Penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem berlangsung bersamaan dengan berbagai program dan kebijakan lintas sektor, sehingga pengaruh aplikasi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh intervensi lainnya berdasarkan data deskriptif tersebut. Selain itu, pemberitaan resmi menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem pada 2021 mencapai 21.490 orang dan meningkat menjadi 25.790 orang pada 2022 (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2023a). Angka tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan ekstrem masih membutuhkan

penanganan berkelanjutan, bahkan sebelum aplikasi diluncurkan. Perbandingan antartahun juga harus mempertimbangkan kesesuaian definisi, sumber data, dan metode penghitungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 capaian. Pertama, KEMISAN MESRA menyediakan sarana integrasi data dan pencatatan intervensi dengan cakupan sasaran yang tinggi menurut angka pada portal. Kedua, pemerintah daerah melaporkan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 4,45% antara Triwulan I dan Triwulan IV 2023 (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2023c). Namun, belum tersedia bukti evaluasi independen yang cukup untuk mengukur persentase penurunan kemiskinan yang secara khusus disebabkan oleh aplikasi. Untuk membuktikan dampak tersebut, penelitian lanjutan perlu membandingkan data sasaran sebelum dan sesudah intervensi, jenis serta intensitas bantuan yang diterima, perubahan status kesejahteraan rumah tangga, dan perkembangan indikator kemiskinan dengan metode evaluasi yang memadai.

D. Transferabilitas Inovasi KEMISAN MESRA bagi Pemerintah Daerah

Potensi transferabilitas KEMISAN MESRA perlu dipahami sebagai kemampuan mengadaptasi mekanisme tata kelola, bukan sekadar menyalin aplikasi ke daerah lain. Dalam konteks ini, transferabilitas merujuk pada sejauh mana pendekatan tata kelola digital yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dialihkan, diadaptasi, dan diterapkan oleh pemerintah daerah lain sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah masing-masing.

Dokumen rancangan aksi perubahan tahun 2023 menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang dengan proses bisnis yang relatif sederhana sehingga dapat direplikasi atau diadaptasi oleh pihak lain yang menghadapi kebutuhan serupa (Prayogo, 2023). Desain tersebut menawarkan alternatif solusi bagi pemerintah daerah yang menghadapi persoalan data sasaran yang belum terhubung dengan program, kesulitan memantau penerima manfaat, dan keterbatasan informasi mengenai intervensi yang telah dilaksanakan. Dalam perspektif digital governance, nilai inovasi ini tidak semata-mata terletak pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada kemampuannya mendukung integrasi informasi, koordinasi program, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, transferabilitas KEMISAN MESRA perlu dinilai berdasarkan kemampuan pemerintah daerah lain untuk mengadaptasi fungsi dan proses tata kelolanya, bukan hanya menyalin aplikasi yang digunakan.

Laporan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan mencantumkan indikator replikasi sebanyak tiga kali (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2025). Berdasarkan dokumen tersebut replikasi telah diidentifikasi, daerah yang disebutkan meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Ngawi. Informasi ini menunjukkan adanya upaya penyebarluasan inovasi tata kelola digital yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada pemerintah daerah lain. Replikasi tersebut berpotensi menjadi sarana pembelajaran antardaerah dalam mengintegrasikan data sasaran kemiskinan ekstrem dengan program intervensi lintas perangkat daerah.

KEMISAN MESRA memiliki beberapa karakteristik dari sisi desain yang berpotensi mendukung transferabilitas inovasi bagi pemerintah daerah lain. Pertama, aplikasi menghubungkan data individu sasaran dengan program dan kegiatan sehingga pemerintah dapat menelusuri keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan intervensi. Kedua, sistem menyediakan informasi mengenai sasaran yang telah dan belum memperoleh intervensi sehingga dapat membantu proses pemantauan dan evaluasi. Ketiga, aplikasi membuka peluang bagi keterlibatan pemangku kepentingan dan dunia usaha dalam mendukung penanganan kemiskinan ekstrem (Permani et al, 2021). Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar pembelajaran antardaerah, terutama bagi pemerintah yang ingin memperkuat koordinasi program penanggulangan kemiskinan melalui tata kelola digital. Meskipun

demikian, penerapan model ini di daerah lain memerlukan sejumlah prasyarat, antara lain ketersediaan dan kualitas data sasaran, kesesuaian sistem dengan proses bisnis pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta komitmen pimpinan daerah. Artinya, transferabilitas KEMISAN MESRA tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah penerima untuk menyesuaikan inovasi dengan konteks kelembagaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, transferabilitas KEMISAN MESRA tidak hanya dipahami sebagai kemungkinan menyalin model aplikasi atau capaian administratif replikasi, tetapi sebagai proses pembelajaran kebijakan yang perlu diuji melalui bukti penerapan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, kebaruan penelitian ini terletak pada pemaknaan KEMISAN MESRA sebagai instrumen *co-coordination* dalam tata kelola digital penanggulangan kemiskinan ekstrem. Berbeda dari pemahaman yang menempatkan platform digital terutama sebagai sarana integrasi informasi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai strategis KEMISAN MESRA terletak pada keterhubungan tiga dimensi tata kelola, yaitu integrasi data sasaran dengan program intervensi, koordinasi lintas aktor dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta pemantauan dan akuntabilitas atas intervensi yang tercatat. Ketiga dimensi tersebut membentuk kerangka analitis untuk memahami bagaimana data digital berpotensi diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan kolektif lintas perangkat daerah. Namun, analisis dokumen juga memperlihatkan adanya perbedaan antara kapasitas sistem dalam mencatat cakupan intervensi dan bukti keberhasilan substantif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bukan membuktikan efektivitas kausal KEMISAN MESRA, melainkan menawarkan kerangka konseptual untuk menilai desain tata kelola digital berdasarkan keterhubungan data, koordinasi, dan akuntabilitas, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan inovasi bergantung pada tindak lanjut kelembagaan dan hasil intervensi yang dapat diverifikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa KEMISAN MESRA (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera) bukan sekadar aplikasi informasi kemiskinan, melainkan instrumen *digital governance* yang dirancang untuk mengintegrasikan data sasaran dengan program intervensi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Pasuruan. Melalui pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) berbasis *by name by address*, KEMISAN MESRA menghubungkan penentuan sasaran dengan strategi penanganan, program, kegiatan, lokasi, dan dukungan anggaran. Mekanisme ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi fragmentasi informasi dan memperkuat keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Analisis menunjukkan bahwa KEMISAN MESRA memiliki potensi untuk memperkuat tata kelola penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi. Pada dimensi integrasi data dan program, aplikasi menyediakan mekanisme untuk menghubungkan data sasaran dengan intervensi yang direncanakan dan dilaksanakan. Pada dimensi koordinasi kolaboratif lintas aktor (*co-coordination*), sistem menyediakan sarana pendukung bagi Bappelitbangda, Diskominfo, perangkat daerah, TKPKD, dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan informasi dan pelaksanaan program. Sementara itu, pada dimensi pemantauan dan akuntabilitas, pencatatan status intervensi memungkinkan pemerintah mengidentifikasi sasaran yang telah maupun belum memperoleh penanganan. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa nilai strategis KEMISAN MESRA terletak pada upayanya menghubungkan teknologi digital dengan koordinasi kelembagaan dan pengelolaan program berbasis data.

Dari sisi capaian, data pada portal KEMISAN MESRA mencatat 27.398 penduduk miskin ekstrem, dengan 26.849 orang tercatat telah diintervensi dan 549 orang belum diintervensi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaporkan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 28.673 orang pada Triwulan I 2023 menjadi 27.398 orang pada Triwulan IV 2023. Capaian tersebut memberikan gambaran mengenai cakupan pencatatan intervensi dan perkembangan penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. Namun, jumlah penduduk yang tercatat telah menerima intervensi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa mereka telah keluar dari kemiskinan ekstrem. Demikian pula, penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem belum dapat dikaitkan secara langsung dengan penggunaan KEMISAN MESRA karena terdapat berbagai program dan kebijakan lain yang berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, kontribusi aplikasi lebih tepat dipahami sebagai dukungan terhadap integrasi informasi dan koordinasi pelaksanaan program, sedangkan dampak langsungnya terhadap pengurangan kemiskinan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

KEMISAN MESRA juga memiliki potensi transferabilitas bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi persoalan keterpisahan data sasaran dan program intervensi. Replikasi inovasi ini dapat menjadi sarana pembelajaran antardaerah dalam mengembangkan tata kelola digital yang lebih terkoordinasi. Meskipun demikian, keberhasilan transferabilitas tidak cukup dinilai dari adanya replikasi atau adopsi aplikasi, tetapi perlu dilihat dari kemampuan daerah penerima menyesuaikan sistem dengan kebutuhan, kapasitas kelembagaan, dan karakteristik masyarakatnya. Dengan demikian, KEMISAN MESRA dapat dipandang sebagai salah satu bentuk inovasi tata kelola digital daerah yang potensial dalam mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keberhasilan substantifnya tetap bergantung pada kualitas data, efektivitas koordinasi lintas aktor, akuntabilitas pelaksanaan intervensi, dan kemampuan pemerintah memastikan bahwa program yang diberikan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen sehingga temuan terutama menggambarkan desain, mekanisme, dan capaian yang tercatat dalam sumber dokumenter. Penelitian ini belum dilengkapi wawancara dengan pengelola aplikasi, perangkat daerah pelaksana, TKPKD, maupun penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian belum dapat menggali secara langsung pengalaman para aktor, kendala implementasi, dan persepsi masyarakat terhadap manfaat KEMISAN MESRA. Kedua, ketersediaan data yang dianalisis belum memungkinkan pengujian secara mendalam mengenai akurasi data sasaran, konsistensi pencatatan intervensi, dan efektivitas koordinasi lintas aktor dalam praktik. Ketiga, penelitian belum mengukur hubungan kausal antara penggunaan KEMISAN MESRA dan penurunan kemiskinan ekstrem. Perubahan jumlah penduduk miskin ekstrem yang dilaporkan pemerintah daerah belum dapat dipisahkan dari pengaruh program dan kebijakan lain yang dilaksanakan secara bersamaan. Keempat, analisis transferabilitas masih terbatas pada dokumen mengenai replikasi dan belum membandingkan secara langsung proses adaptasi, pelaksanaan, serta hasil penerapan inovasi di daerah penerima. Meskipun demikian, analisis dokumen tetap memberikan dasar untuk memahami desain tata kelola digital KEMISAN MESRA sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Bappelitbangda bersama perangkat daerah terkait disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan pemutakhiran data sasaran kemiskinan ekstrem agar informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi sesuai dengan kondisi masyarakat. Integrasi data perlu

diikuti dengan verifikasi berkala dan pencatatan intervensi secara konsisten sehingga sistem tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi dasar penentuan prioritas program. Selain itu, koordinasi lintas aktor perlu diperkuat melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, pertukaran informasi yang teratur, dan tindak lanjut terhadap sasaran yang belum memperoleh penanganan. TKPKD dapat mengoptimalkan fungsi pemantauan dan evaluasi untuk mendorong penyelarasan program serta mengidentifikasi kesenjangan intervensi antardaerah maupun antarkelompok sasaran.

Pengembangan KEMISAN MESRA selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan pemantauan berbasis hasil, bukan hanya pencatatan jumlah penduduk yang telah menerima intervensi. Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan mekanisme evaluasi yang dapat menelusuri jenis intervensi, kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima, dan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat setelah intervensi diberikan. Evaluasi tersebut perlu memperhatikan kontribusi berbagai program lintas sektor agar penilaian dampak tidak hanya didasarkan pada perubahan jumlah penduduk miskin ekstrem. Di samping itu, pengelolaan data pribadi penduduk harus dilaksanakan secara bertanggung jawab melalui pembatasan akses sesuai kewenangan dan penerapan mekanisme perlindungan data yang memadai.

Bagi pemerintah daerah lain yang ingin mereplikasi KEMISAN MESRA, proses adopsi disarankan tidak hanya berfokus pada penyalinan aplikasi, tetapi juga pada adaptasi proses bisnis, kesiapan infrastruktur digital, kualitas data, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat mendukung proses tersebut melalui penyusunan pedoman teknis dan dokumentasi pembelajaran yang menjelaskan mekanisme integrasi data, pembagian peran, pemantauan intervensi, serta tantangan implementasi. Penelitian selanjutnya juga disarankan melakukan wawancara dengan pengelola dan pengguna aplikasi, serta membandingkan implementasi KEMISAN MESRA di Kabupaten Pasuruan dengan daerah yang mereplikasinya. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menilai sejauh mana inovasi dapat ditransfer secara efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kontribusi Author

Penulis pertama (Retna Dea Mustika) bertanggung jawab atas konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil penelitian, serta penyusunan draf awal manuskrip. Penulis kedua (Bintoro Wardiyanto) berkontribusi dalam supervisi akademik, pemberian arahan konseptual dan metodologis, penelaahan kritis terhadap substansi penelitian, serta penyempurnaan manuskrip untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah penulisan ilmiah. Penulis ketiga (Mar'atus Ratna Kurnia) berkontribusi melalui diskusi akademik, pemberian masukan terhadap interpretasi hasil penelitian, serta penyempurnaan argumentasi dan kualitas akademik manuskrip.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT untuk penerjemahan abstrak. Penulis telah memeriksa dan menyunting kembali konten tersebut secara menyeluruh, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh isi publikasi ini.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator kesejahteraan rakyat 2024. <https://www.bps.go.id/>
Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9 (2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

- Eom, S. J., & Lee, J. (2022). Digital government transformation in turbulent times: Responses, challenges, and future direction. *Government Information Quarterly*, 39(2), Article 101690. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101690>
- Krogh, A. H., & Triantafillou, P. (2024). Developing New Public Governance as a public management reform model. *Public Management Review*, 26(10), 3040–3056. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2313539>
- Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report*, 27(1), 64–77. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Muslim, M. A., Prasajo, E., & Jannah, L. M. (2021). Collaborative governance for poverty alleviation: A systematic mapping study. *RUDN Journal of Public Administration*, 8(1), 20–36. <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2021-8-1-20-36>
- Nurmandi, A., Salahudin, S., Jamil, M. K., & Purnomo, E. P. (2022). Can Satu Data Indonesia policy integrate government data? A case study of three cities in Indonesia. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 16(1), 70–89. <https://doi.org/10.1108/TG-03-2021-0048>
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2023a, September 19). Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan luncurkan aplikasi Kemisan Mesra. <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/bappelitbangda-kabupaten-pasuruan-luncurkan-aplikasi-kemisan-mesra>
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2023b). Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2023c, December 30). Reduksi kemiskinan ekstrem, Pemkab Pasuruan maksimalkan realisasi program lintas perangkat daerah. <https://www.pasuruankab.go.id/berita/reduksi-kemiskinan-ekstrem-pemkab-pasuruan-maksimalkan-realisasi-program-lintas-perangkat-daerah>
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2025). Laporan inovasi daerah: KEMISAN MESRA (Aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera).
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (n.d.). KEMISAN MESRA: Aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera. <https://sipp.pasuruankab.go.id/kemiskinan>
- Permani, R., Sumaryana, A., & Sugandi, Y. S. (2021). Collaborative governance in poverty reduction in Bandung City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 24–39. <https://doi.org/10.26858/jiap.v11i1.19742>
- Prayogo, K. A. (2023). Rancangan aksi perubahan: Integrasi intervensi program dan data P3KE melalui pembuatan aplikasi Kemisan Mesra di Kabupaten Pasuruan [Rancangan aksi perubahan, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XII]. Scribd. <https://id.scribd.com/document/662101219/RAP-KOKOK-ADI-PRAYOGO>
- Pribadi, U., Iqbal, M., Ibrahim, M. A., Juhari, & Ahdarrijal, Y. (2024). Nexus of public organization, transparency, and accountability in Indonesia's digital governance. *Journal of Public Affairs*, 24(3), Article e2940. <https://doi.org/10.1002/pa.2940>
- Reggi, L., & Dawes, S. S. (2022). Creating open government data ecosystems: Network relations among governments, user communities, NGOs and the media. *Government Information Quarterly*, 39(2), Article 101675. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101675>
- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334–340. [https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4%3C334%3A%3AAID-NUR9%3E3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4%3C334%3A%3AAID-NUR9%3E3.0.CO;2-G)

- Schmeling, J., Al Dakruni, S., & Mergel, I. (2025). Data collaboration in digital government research: A literature review and research agenda. *Government Information Quarterly*, 42(3), Article 102063. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2025.102063>
- Scupola, A., & Mergel, I. (2022). Co-production in digital transformation of public administration and public value creation: The case of Denmark. *Government Information Quarterly*, 39(1), Article 101650. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101650>
- Van Popering-Verkerk, J., Molenveld, A., Duijn, M., van Leeuwen, C., & van Buuren, A. (2022). A framework for governance capacity: A broad perspective on steering efforts in society. *Public Management Review*, 24(9), 1356–1376. <https://doi.org/10.1177/00953997211069932>
- Voets, J., Brandsen, T., Koliba, C., & Verschuere, B. (2021). Collaborative governance. In Oxford research encyclopedia of politics. *Oxford University Press*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1419>
- Wahyuni, H. I., Fitrah, A. A., Eprilianto, D. F., & Mardalena, I. (2024). Technology, transparency, and collaboration/integration: Analysis of digital government problems from public communication perspective during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Information Polity*, 29(1), 93–111. <https://doi.org/10.3233/IP-211545>